

# **BAB I**

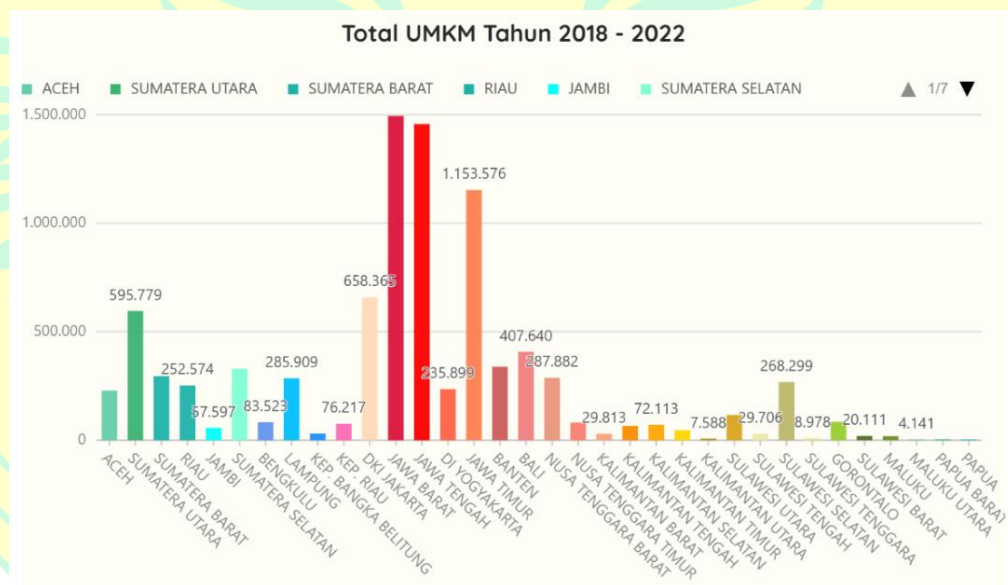
## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perekonomian. Indonesia terus menghadapi berbagai hambatan untuk melakukan ekspansi dan pemulihan yang cepat, terutama yang berkaitan dengan pertumbuhan pendapatan jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat. Dengan situasi ekonomi Indonesia saat ini, kebutuhan sehari-hari masih dijadikan hal yang wajib sekali untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Cara untuk meningkatkan standar hidup warganya, pemerintah Indonesia menyediakan sejumlah inisiatif untuk pemberdayaan ekonomi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai potensi dalam memajukan ekspansi keuangan yang substansial. UMKM di Indonesia begitu krusial untuk perkembangan keuangan negara. Bisnis-bisnis ini, yang biasanya dijalankan oleh keluarga, kelompok, orang, atau perusahaan, sangat penting bagi ekonomi Indonesia yang sedang berkembang. Ada inisiatif yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan otonomi mereka, terutama di daerah sekitar. UMKM merupakan pelaku ekonomi penting yang memengaruhi PDB Indonesia. Misalnya, krisis mata uang tahun 1997 menarik perhatian pada kerentanan ekonomi Indonesia selama turbulensi keuangan global dengan menyebabkan resesi dan penurunan nilai rupiah.

UMKM. memainkan tugas utama dalam perekonomian Indonesia, dan juga sangat penting untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran. UMKM dapat bertahan di masa ekonomi yang sulit karena kemampuannya beradaptasi dengan pasar yang cepat. Pemerintah perlu lebih memperhatikan pemberdayaan UMKM jika ingin mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah harus memastikan apakah sebuah perusahaan merupakan usaha mikro, kecil, atau menengah sebelum menawarkan langkah-langkah pemberdayaan seperti bantuan keuangan atau pelatihan (Santoso et al., 2022). Kesehatan ekonomi negara-negara berkembang secara signifikan dipengaruhi

oleh usaha mikro, kecil, dan menengah. Mereka sudah disetujui mempunyai tanggung jawab krusial pada masyarakat, termasuk mendorong pengembangan sumber daya manusia dan menumbuhkan lapangan kerja melalui kreativitas dan inovasi. Baik dampak langsung maupun jangka panjang berdampak pada tingkat pendapatan dan pada akhirnya membantu pengentasan kemiskinan. Selain itu, keberadaan operasi UMKM mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk mengembangkan sumber daya manusia dan memperoleh keterampilan baru (Agyapong, 2010). Usaha mikro, kecil, dan menengah mempunyai kekuatan dalam meredakan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Selain itu, usaha mikro, kecil, dan menengah hadir dengan sumber lapangan kerja selama periode pemutusan hubungan kerja yang signifikan dari pemerintah (Mukhtar et al., 2018). Banyaknya jumlah unit UMKM juga menyebabkan perekonomian negara menjadi lebih kuat.

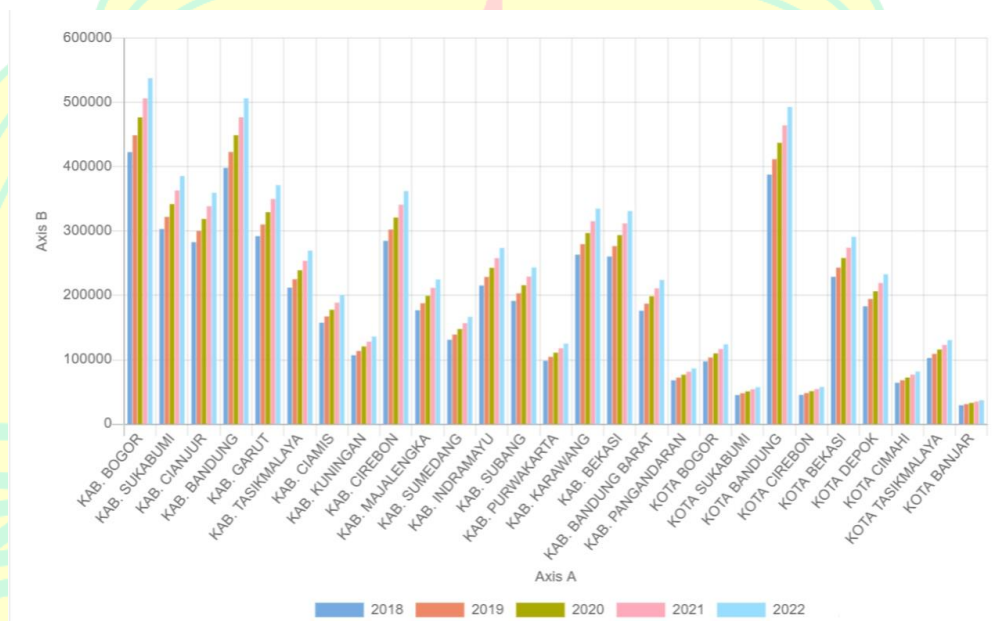


**Gambar 1. 1 Jumlah UMKM Indonesia Tahun 2018 - 2022**

*Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM*

Di banyak daerah, jumlah perusahaan mikro, kecil, dan menengah (UMKM) meningkat dengan cepat. Kemenkop UKM memproyeksikan bahwasannya pada tahun 2022, ada 65,46 juta UMKM yang beroperasi di Indonesia. Karena jumlah UMKM sangat banyak dan sebagian besar dari

mereka tidak terdaftar, statistik ini masih berupa estimasi dan tidak secara akurat merepresentasikan jumlah total UMKM. Sementara itu, 8,71 juta UMKM di Indonesia telah mendaftarkan perusahaan mereka di platform OSS; distribusi lokasi perusahaan-perusahaan ini digambarkan pada gambar terlampir, yang menunjukkan bahwa pulau Jawa merupakan rumah bagi sebagian besar UMKM.



**Gambar 1.2 Jumlah UMKM Jawa Barat Tahun 2018 - 2022**

*Sumber: Opendata.Jabarprov.go.id*

Jumlah UMKM di Provinsi Jawa Barat meningkat secara dramatis antara tahun 2018 dan 2022, dengan perkiraan 3 juta unit UMKM, menurut data statistik dari [opendata.jabarprov.go.id](https://opendata.jabarprov.go.id). Hal ini terlihat pada gambar berikut, di mana Kabupaten Bogor, dengan perkiraan 540 ribu unit, berada di posisi pertama, diikuti oleh Kabupaten Bandung, dengan perkiraan 510 ribu unit, dan Kota Bandung, dengan perkiraan 490 ribu unit, di posisi ketiga. Adapun Kabupaten Bekasi diproyeksikan memiliki 330.000 unit UMKM pada tahun 2022, menempatkannya di posisi kedelapan. UMKM Jawa Barat berkembang dengan baik, dan pemerintah masih terus mendorong industri ini dengan sejumlah inisiatif dan peraturan.

**Tabel 1.1 Jumlah UMKM di Kabupaten Bekasi**

KODE PROV	NAMA PROV	KODE KAB.	NAMA KAB.	JUMLAH	TAHUN
32	JAWA BARAT	3216	KAB. BEKASI	231.042	2016
32	JAWA BARAT	3216	KAB. BEKASI	245.337	2017
32	JAWA BARAT	3216	KAB. BEKASI	260.517	2018
32	JAWA BARAT	3216	KAB. BEKASI	276.635	2019
32	JAWA BARAT	3216	KAB. BEKASI	293.752	2020
32	JAWA BARAT	3216	KAB. BEKASI	311.927	2021

Sumber: Open data Jabar Provinsi

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meningkat begitu cepat di sejumlah wilayah, termasuk di Kabupaten Bekasi. Data dari Opendata.Jabarprov menunjukkan, mulai tahun 2016, jumlah UMKM terus meningkat sebanyak 231.042 unit, dan tidak mengalami penurunan hingga tahun 2021 yang mencapai 311.927 unit. Kemudian, pada tahun 2019 dan 2020, jumlah UMKM meningkat sebanyak 17.117 unit, selama Pandemi yang menyebar di semua wilayah. Karena perusahaan-perusahaan ini membayar biaya hidup karyawan mereka, terbukti bahwa UMKM memainkan peran penting bagi Negara dan masyarakat. Jumlah UMKM diperkirakan akan terus meningkat tajam di tahun kedepannya.

**Tabel 1.2 Jumlah Pendapatan UMKM Di Kabupaten Bekasi**

KODE PROV	NAMA PROV	KODE KAB.	NAMA KAB.	JUMLAH	TAHUN
32	JAWA BARAT	3216	KAB. BEKASI	Rp 3,679,211,097	2017
32	JAWA BARAT	3216	KAB. BEKASI	Rp 2,490,622,648	2018
32	JAWA BARAT	3216	KAB. BEKASI	Rp 2,985,641,416	2019
32	JAWA BARAT	3216	KAB. BEKASI	Rp 3,673,331,668	2020
32	JAWA BARAT	3216	KAB. BEKASI	Rp 3,031,193,815	2021

Sumber: BPS Indonesia

Pendapatan UMKM di Kabupaten Bekasi mengalami penurunan akibat Covid-19. Seperti yang ditunjukkan pada tabel sebelumnya, pendapatan mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021. Statistik UNDP dan LPEM UI menunjukkan bahwa > 48% pelaku usaha mengalami masalah dalam memperoleh bahan mentah, 77% menghadapi turunnya hasil penjualan, 88% memperoleh penurunan hasil permintaan, dan 97% mendapati turunan nilai aset. Sebagai hasilnya, pemerintah meluncurkan strategi baru untuk melindungi

dan menghidupkan kembali UMKM dari penurunan akibat Covid-19. Program Bangga Buatan Indonesia, Program PEN, dan UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya adalah tiga program utama yang telah diadopsi oleh pemerintah. Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), bidang pendanaan KUR selama pandemi, subsidi bunga atau margin non-KUR, dan program bantuan pemerintah lainnya hanyalah beberapa dari inisiatif pendukung UMKM yang merupakan bagian dari program PEN. Salah satu inisiatif tersebut adalah Kredit Usaha Rakyat, yang menawarkan dukungan dana kerja dan *invest* melalui sarana jaminan untuk perusahaan yang menguntungkan bagi UMKM.

Kurangnya keterampilan manajerial, terutama dalam hal mengelola dana yang seharusnya hanya digunakan untuk tujuan perusahaan tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan non-bisnis, dan pemasaran yang buruk adalah masalah yang sering dihadapi UMKM (Saragih & Nasution, 2015). Mengembangkan keterampilan berbisnis sering kali sulit bagi pengusaha UMKM karena berbagai tantangan yang berkaitan, termasuk sedikitnya modal (baik dari segi besar atau sumber), rendahnya *skill* manajerial dan operasional, kurangnya struktur perusahaan formal, organisasi yang lemah, dan kendala keuangan yang membatasi ruang lingkup bisnis mereka. Sumber modal dilihat berdasarkan urutan asalnya: modal pinjaman dan modal sendiri (Nursafitri, 2022). Baik bank ataupun non bank saat ini menawarkan pinjaman modal kepada masyarakat dalam membantu pertumbuhan bisnis. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pengembangan perusahaan adalah ketidakmampuan individu untuk mengelola keuangan mereka sendiri. Masyarakat percaya jika mereka yang punya itu dapat dimanfaatkan secara bebas karena dananya memiliki nilai yang rendah. Hal ini juga termasuk dalam area masalah modal. Di sisi lain, uang pinjaman dan dana pribadi terkadang digunakan untuk tujuan non bisnis; uang tersebut hanya dimaksudkan untuk perusahaan yang mereka awasi. Jelas bahwa ketidakmampuan masyarakat untuk mengelola modal pinjaman bisnis secara efektif merupakan akibat dari kebutuhan akan keuangan, terutama mengingat pendapatan yang relatif rendah.

Bank terus menyempurnakan berbagai penawarannya, termasuk pinjaman modal, untuk mendukung stabilitas dan kemajuan industri perbankan. Memberikan pinjaman uang kepada UMKM untuk dana bisnis. Untuk menciptakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), negara bekerjasama bersama lembaga keuangan, bank pembangunan daerah, bank swasta. Lembaga keuangan sangat penting bagi organisasi keuangan mikro karena mereka menyediakan permodalan untuk bisnis kecil dan menengah. Perusahaan-perusahaan UMKM, sebagian besar pendanaannya berasal dari pemerintah dan dapat meningkatkan pendapatannya dengan menggunakan kredit usaha rakyat sebagai sokongan modal. Di sisi lain, modal yang didanai bersama hutang, mempunyai kewajiban dan risiko tambahan di atas yang sudah dimilikinya. Bagi sebagian orang yang memulai usaha dengan utang, hal ini menimbulkan kekhawatiran (Riawan & Kusnawan, 2018).

Bisnis mikro, kecil, menengah dapat dibantu dengan kredit usaha rakyat. Terkait penyaluran KUR, ada beberapa kendala yang kerap dialami nasabah, khususnya saat hendak mengajukan KUR. Proses pengajuan KUR kerap kali membutuhkan persyaratan yang ketat, seperti kelengkapan dokumen pendukung, dokumen yang harus dilengkapi, dan prosedur administrasi yang berbelit-belit. Bagi UMKM, khususnya yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya dan informasi, ini dapat menjadi kendala. Pandangan bank terhadap UMKM tertentu sebagai "*unbankable*" bermula dari fakta bahwa KUR merupakan kredit yang hanya memerlukan sedikit atau bahkan tidak memerlukan agunan, sehingga menyulitkan peminjam yang tidak memiliki agunan yang memadai untuk memperoleh kredit. Persyaratan agunan sering kali menghambat perluasan pendanaan. Meskipun suku bunga KUR lebih rendah daripada suku bunga pinjaman komersial, bunga, dan biaya administrasi yang masih harus dibayarkan mungkin masih menjadi beban keuangan yang cukup besar bagi banyak UMKM. Lebih jauh, profitabilitas usaha komersial pelaku UMKM terkadang dipertanyakan, sehingga menimbulkan keraguan tentang kelayakan kredit mereka. Selain itu, kendala distribusi (19%) dan manufaktur

(18,87%) menyebabkan kesulitan dalam pencairan KUR (Maryatmo et al., 2009).

Pada penelitian-penelitian sebelumnya, terdapat kesenjangan yang ditemukan. Terdapat *Methodological Gap* atau kesenjangan metode penelitian, yaitu kurangnya variasi metode penelitian pada penelitian sebelumnya yang dapat menggunakan jalur penyelidikan yang berbeda. Terlihat pada penelitian Riawan & Kusnawan (2018) Pada sektor UMKM, baik modal sendiri maupun modal kredit dari KUR secara signifikan mampu meningkatkan hasil laba perusahaan. Studi ini dibantu program SPSS untuk analisis regresi linier berganda. Menurut penelitian Kerih (2021) modal sendiri dan kredit usaha rakyat dapat meningkatkan laba bisnis. Selain itu, ekonomi kreatif Kota Kupang memanfaatkan teknik analisis regresi linier berganda SPSS. Dengan mempertimbangkan semua hal tersebut, penelitian ini sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan dan perekonomian masyarakat serta membantu dalam perumusan kebijakan publik yang lebih baik. Penelitian-penelitian sebelumnya telah dilakukan dan memberikan bukti untuk penelitian. Informasi latar belakang yang telah diberikan memungkinkan peneliti untuk merencanakan studi yang berjudul **“Pengaruh Modal. Sendiri dan .Kredit Usaha Rakyat. terhadap Pendapatan. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. di Wilayah Tambun Selatan: Kab. Bekasi”**.

## **1.2 Pertanyaan Penelitian**

Berikut ini adalah pertanyaan penelitian berdasarkan susunan latar belakang:

- 1) Apakah terdapat pengaruh modal sendiri terhadap pendapatan UMKM di wilayah Tambun Selatan?
- 2) Apakah terdapat pengaruh Kredit Usaha Rakyat terhadap pendapatan UMKM di wilayah Tambun Selatan?
- 3) Apakah terdapat pengaruh modal sendiri dan Kredit Usaha Rakyat terhadap pendapatan UMKM di wilayah Tambun Selatan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berikut ini adalah tujuan penelitian, yang sejalan dengan pertanyaan penelitian yang diajukan:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh modal sendiri terhadap pendapatan UMKM di wilayah Tambun Selatan.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh Kredit Usaha Rakyat terhadap pendapatan UMKM di wilayah Tambun Selatan.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh modal sendiri dan Kredit Usaha Rakyat terhadap pendapatan UMKM di wilayah Tambun Selatan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan semua penjelasan yang telah disebutkan sebelumnya, studi ini telah menghasilkan manfaat teoritis dan praktisi. Manfaat teoritis dari studi ini adalah penulis berharap bagi pembaca dapat memanfaatkan penelitian ini agar menambah pemahaman dan memajukan pengetahuan, tepatnya di bidang ekonomi UMKM. Bagi praktisi, penulis berharap penelitian ini dapat membantu individu dalam memberikan wawasan baru tentang bagaimana pendapatan UMKM dipengaruhi oleh kredit usaha rakyat dan modal sendiri.